

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 24 Mei 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 24 Mei 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran SAP</b> .....	
<b>B. Laporan Realisasi Anggaran Gabungan</b> .....	
<b>C. Laporan Operasional</b> .....	
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....	
<b>E. Neraca</b> .....	
<b>F. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
<b>II. INFORMASI UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> .....	5
2.1 Profil Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....	5
2.2 Kegiatan Pokok Organisasi .....	6
2.3 Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....	9
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	10
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	10
3.1.1 Pendapatan.....	10
3.1.2 Belanja.....	11
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	15
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	15
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	16
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	29
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	34
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih .....	34
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas .....	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP .....	35
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	35

<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH</b> .....	37
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	37
5.1.1. Pendapatan Daerah .....	37
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA .....	38
5.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah – LRA.....	38
5.1.2. Belanja.....	38
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	40
5.1.2.2 Belanja Modal .....	47
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	51
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	51
5.2.1. Aset.....	52
5.2.1.1 Aset Lancar.....	53
5.2.1.2 Aset Tetap .....	55
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	65
5.2.2. Kewajiban.....	66
5.2.3. Ekuitas .....	67
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	67
5.3.1. Pendapatan – LO .....	67
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah PAD – LO .....	68
5.3.2. Beban - LO .....	69
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	79
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
5.4.1 Ekuitas Awal .....	80
5.4.2 Surplus/defisit LO .....	80
5.4.3 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	80
<b>VI. PENUTUP</b> .....	82

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2023 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP AkruaI pada pemerintah Daerah.



**BAB II**  
**INFORMASI UMUM**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1. Profil Dinass Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	19
2.	Golongan III	112
3.	Golongan II	58
4.	Golongan I	1
<b>Jumlah</b>		<b>190</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II.a	1
2.	Eselon III.a	5
3.	Eselon III.b	1
4.	Eselon IV.a	18
5.	Staf	165
<b>Jumlah</b>		<b>190</b>

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana / S3	1
2.	Pasca Sarjana / S2	32
3.	Sarjana / S1	90
4.	Sarjana Muda	5
5.	STM/SMEA/SMK/SMA	61
6.	SD	1
<b>Jumlah</b>		<b>190</b>

## 2.2. Kegiatan Pokok Organisasi

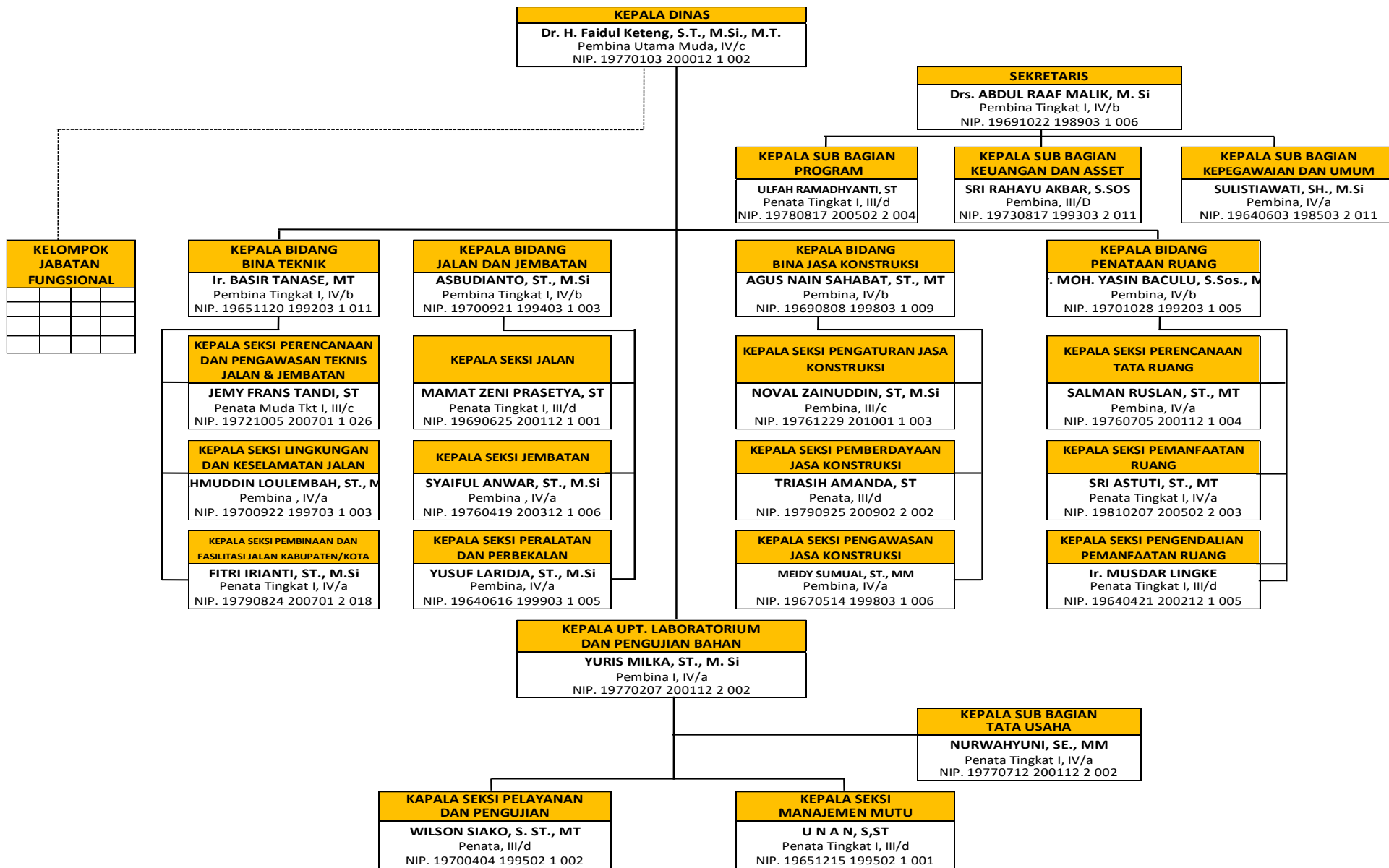
Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas bidang jalan dan jembatan, meliputi pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan jasa konstruksi meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan industri jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi jasa konstruksi;
5. pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga Dan Penataan

Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) unit Eselon III dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disajikan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**



### **2.3. Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

Visi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

“Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas Guna Memberikan Kenyamanan dan Keselamatan pada Masyarakat di Tahun 2023”

Dalam rangka mencapai visi tersebut Dinas Bina Marga menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan;
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu pembangunan prasarana jalan dan jembatan; dan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2023**

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2023	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	(Lebih)/Kurang
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan	2.100.000.000,00	3.121.868.608,00	148,66	(1.021.868.608,00)
Belanja	346.986.480.938,00	330.403.477.977,79	95,22	16.583.002.960,21
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(344.886.480.938,00)</b>	<b>(327.281.609.369,79)</b>	<b>94,90</b>	<b>(17.604.871.568,21)</b>

**3.1.1 Pendapatan**

Pada Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp1.503.000.000,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan Tahun 2023 sebesar 132,48 persen atau anggaran terkait pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>3.121.868.608,00</b>	<b>(1.021.868.608,00)</b>	<b>148,66</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>3.121.868.608,00</b>	<b>(1.021.868.608,00)</b>	<b>148,66</b>	
Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	3.119.868.608,00	(1.619.868.608,00)	207,99	
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.119.868.608,00 atau 207,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak teranggarkan ditahun 2023 namun terealisasi sebesar Rp2.000.000,00.

### 3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penataan Ruang, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengelola anggaran belanja sebesar Rp346.986.480.938,00 yang terdiri empat program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp31.460.524.319,00 atau 95,13 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program penyelenggaraan jalan terealisasi sebesar Rp144.020.027.956,50 atau 76,80 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggran program pengembangan jasa konstruksi terealisasi sebesar Rp966.942.884,00 atau 93,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dan realiasi anggaran program penyelenggaraan penataan ruang terealisasi sebesar Rp1.410.087.581,00 atau 96,57 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>42.107.936.480,00</b>	<b>39.037.920.495,00</b>	<b>(3.070.015.985,00)</b>	<b>92,71</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	698.421.850,00	655.912.757,00	(42.509.093,00)	93,91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	383.247.850,00	347.763.457,00	(35.484.393,00)	90,74
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.229.400,00	40.467.150,00	(1.762.250,00)	95,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.169.200,00	118.738.450,00	(1.430.750,00)	98,81
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.775.400,00	148.943.700,00	(3.831.700,00)	97,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.929.595.596,00	19.222.393.885,00	(2.707.201.711,00)	87,66

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.073.175.746,00	17.493.665.135,00	(2.579.510.611,00)	87,15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.728.739.850,00	1.603.526.900,00	(125.212.950,00)	92,76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.182.000,00	63.011.850,00	(170.150,00)	99,73
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	64.498.000,00	62.190.000,00	(2.308.000,00)	96,42
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	792.609.450,00	772.291.250,00	(20.318.200,00)	97,44
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	792.609.450,00	772.291.250,00	(20.318.200,00)	97,44
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	263.573.750,00	253.870.606,00	(9.703.144,00)	96,32
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.482.000,00	135.740.250,00	(741.750,00)	99,46
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.951.750,00	48.817.327,00	(4.134.423,00)	92,19
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.140.000,00	69.313.029,00	(4.826.971,00)	93,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.704.559.935,00	1.660.263.194,00	(44.296.741,00)	97,4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.994.095,00	149.294.300,00	(699.795,00)	99,53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.704.700,00	23.000.984,00	(703.716,00)	97,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.999.290,00	4.872.400,00	(126.890,00)	97,46
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.225.850,00	42.452.994,00	(772.856,00)	98,21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.079.800,00	33.157.800,00	(1.922.000,00)	94,52
Penyediaan Bahan/Material	113.683.700,00	112.491.580,00	(1.192.120,00)	98,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.237.750.800,00	1.199.049.036,00	(38.701.764,00)	96,87
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	96.121.700,00	95.944.100,00	(177.600,00)	99,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.026.003.845,00	5.883.641.782,00	(142.362.063,00)	97,64
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	796.532.734,00	766.810.000,00	(29.722.734,00)	96,27
Pengadaan Alat Besar	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100
Pengadaan Mebel	500.855.139,00	492.827.750,00	(8.027.389,00)	98,4
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.449.856.672,00	3.353.958.232,00	(95.898.440,00)	97,22
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.038.759.300,00	1.030.045.800,00	(8.713.500,00)	99,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.884.404.184,00	6.810.694.199,00	(73.709.985,00)	98,93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.247.200,00	14.905.200,00	(2.342.000,00)	86,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	694.011.000,00	660.405.039,00	(33.605.961,00)	95,16



URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.998.450,00	52.091.400,00	(907.050,00)	98,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.120.147.534,00	6.083.292.560,00	(36.854.974,00)	99,4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.808.767.870,00	3.778.852.822,00	(29.915.048,00)	99,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.103.820.000,00	1.096.579.605,00	(7.240.395,00)	99,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	632.999.350,00	629.775.750,00	(3.223.600,00)	99,49
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	346.387.370,00	338.617.650,00	(7.769.720,00)	97,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.725.561.150,00	1.713.879.817,00	(11.681.333,00)	99,32
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>301.922.681.298,00</b>	<b>288.569.853.992,79</b>	<b>(13.352.827.305,21)</b>	<b>95,58</b>
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	301.922.681.298,00	288.569.853.992,79	(13.352.827.305,21)	95,58
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10.682.431.866,00	9.916.222.363,50	(766.209.502,50)	92,83
Pengelolaan Leger Jalan	280.058.250,00	215.317.035,00	(64.741.215,00)	76,88
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.586.613.500,00	2.551.793.708,00	(34.819.792,00)	98,65
Pembangunan Jalan	20.459.675.503,00	20.455.596.591,00	(4.078.912,00)	99,98
Rekonstruksi Jalan	175.684.185.676,00	167.309.834.295,44	(8.374.351.380,56)	95,23
Pemeliharaan Berkala Jalan	7.035.193.500,00	6.898.051.500,00	(137.142.000,00)	98,05
Pemeliharaan Rutin Jalan	34.789.239.090,00	34.645.860.040,00	(143.379.050,00)	99,59
Penggantian Jembatan	27.349.456.145,00	24.375.850.702,00	(2.973.605.443,00)	89,13
Pemeliharaan Rutin Jembatan	5.485.356.600,00	5.475.991.904,00	(9.364.696,00)	99,83
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	9.350.563.001,00	9.206.262.900,00	(144.300.101,00)	98,46
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	438.512.200,00	356.463.405,00	(82.048.795,00)	81,29
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7.781.395.967,00	7.162.609.548,85	(618.786.418,15)	92,05
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>1.555.785.310,00</b>	<b>1.461.163.735,00</b>	<b>(94.621.575,00)</b>	<b>93,92</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.062.660.600,00	999.534.682,00	(63.125.918,00)	94,06
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	520.190.000,00	501.078.089,00	(19.111.911,00)	96,33
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	151.526.800,00	136.322.645,00	(15.204.155,00)	89,97
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	152.500.000,00	152.069.670,00	(430.330,00)	99,72
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	205.454.950,00	182.677.308,00	(22.777.642,00)	88,91
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	32.988.850,00	27.386.970,00	(5.601.880,00)	83,02

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	232.585.860,00	218.086.986,00	(14.498.874,00)	93,77
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	119.709.900,00	111.126.645,00	(8.583.255,00)	92,83
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	112.875.960,00	106.960.341,00	(5.915.619,00)	94,76
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	260.538.850,00	243.542.067,00	(16.996.783,00)	93,48
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	107.577.700,00	100.409.686,00	(7.168.014,00)	93,34
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	152.961.150,00	143.132.381,00	(9.828.769,00)	93,57
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.400.077.850,00</b>	<b>1.334.539.755,00</b>	<b>(65.538.095,00)</b>	<b>95,32</b>
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	327.786.000,00	312.884.621,00	(14.901.379,00)	95,45
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	327.786.000,00	312.884.621,00	(14.901.379,00)	95,45
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	386.842.000,00	362.523.392,00	(24.318.608,00)	93,71
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	135.872.000,00	117.325.104,00	(18.546.896,00)	86,35
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	195.970.000,00	191.418.288,00	(4.551.712,00)	97,68
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	55.000.000,00	53.780.000,00	(1.220.000,00)	97,78
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	270.000.000,00	253.238.015,00	(16.761.985,00)	93,79
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	183.938.015,00	(16.061.985,00)	91,97
Sistem Informasi Penataan Ruang	70.000.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)	99
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	415.449.850,00	405.893.727,00	(9.556.123,00)	97,7
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	48.655.800,00	47.633.106,00	(1.022.694,00)	97,9
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	71.200.200,00	66.127.940,00	(5.072.260,00)	92,88
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	62.120.900,00	61.820.900,00	(300.000,00)	99,52

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	233.472.950,00	230.311.781,00	(3.161.169,00)	98,65

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Kas Daerah

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2023.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2023.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
  - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);  
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
      - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- g. Beban di bayar dimuka
 

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- h. Persediaan
  1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara

lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
    - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
    - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Investasi Non Permanen
    1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
      - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
      - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
      - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
      - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
  - c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Berwujud
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
  - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
  - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batasan Minimal Kapitalisasi Aset**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp.500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp.500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp.300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX

ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
    - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
    - d) sumber dana cadangan.



- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.

- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - a. Pendapatan LRA diakui pada saat :
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
    - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
    - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
    - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
    - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
  - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
    - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
    - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
    - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
  - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
    - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.

- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
    - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
    - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
    - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
    - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  4. Surplus atau Defisit
    - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
    - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
    - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
  5. Pembiayaan
    - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
    - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
    - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
    - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih

- lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
    1. Pendapatan Asli Daerah,
    2. Pendapatan Transfer, dan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan–LO diakui pada saat:
    1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
    2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
  - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
  - f. Beban diakui pada :
    1. Saat timbulnya kewajiban;
    2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - g. Beban diukur sesuai dengan:
    1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
    2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa

tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas**

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



## BAB V

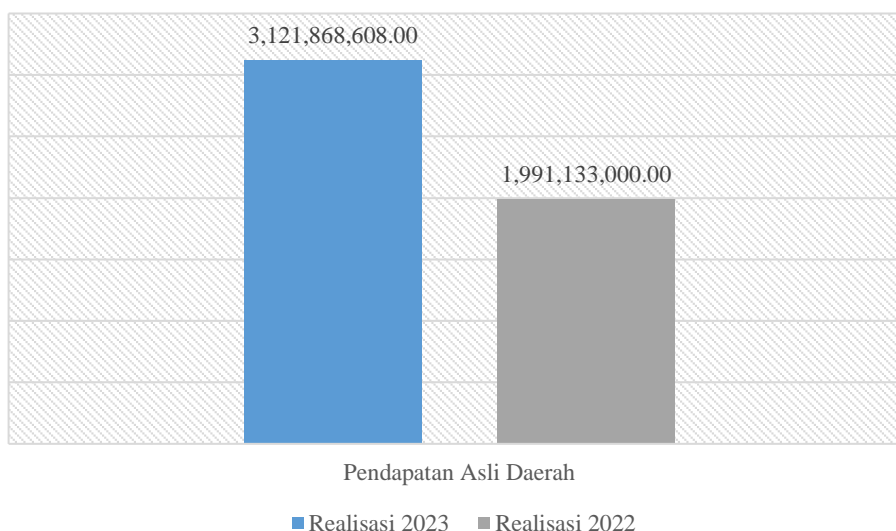
### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	3.121.868.608,00	1.991.133.000,00

Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp3.121.868.608,00 atau 148,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00 adapun jenis Pendapatan hanya berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Jumlah pendapatan tahun ini meningkat sebesar Rp1.130.735.608,00 atau 56,79 persen dari tahun 2022 sebesar Rp1.752.091.500,00. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2023 dan tahun 2022.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>3.121.868.608,00</b>	<b>148,66</b>
Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	3.119.868.608,00	148,57
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.000.000,00	0,00

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.1 Retribusi Daerah</b>	<b>3.119.868.608,00</b>	<b>1.989.133.000,00</b>

Realisasi anggaran retribusi daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.119.868.608,00 atau 132,61 persen dari jumlah anggaran pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.130.735.608,00 atau 56,85 persen dari realisasi tahun 2022 yang sebelumnya berada pada nilai Rp1.989.133.000,00. Pendapatan retribusi daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Realisasi anggaran lain-lain pendapatan asli daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000,00 atau 66,67 persen dari anggaran pendapatan. Pendapatan retribusi daerah berupa hasil sewa barang milik daerah.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>330.403.477.977,79</b>	<b>177.857.582.740,50</b>

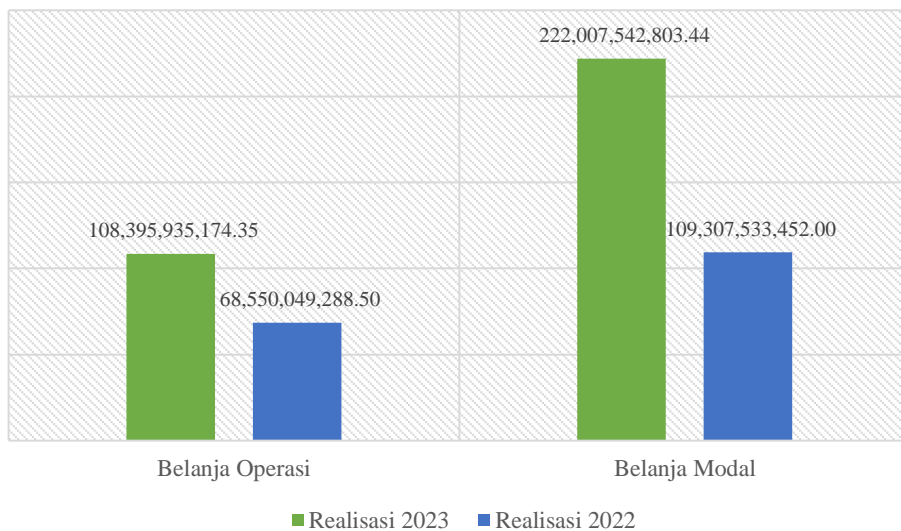
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 sebesar Rp330.403.477.977,79 atau 95,22 persen dari anggaran belanja tahun 2023. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp152.545.895.237,29 atau 85,77 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp177.857.582.740,50. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>Belanja</b>	<b>346.986.480.938,00</b>	<b>330.403.477.977,79</b>	<b>95,22</b>	<b>177.857.582.740,50</b>
Belanja Operasi	113.832.285.002,00	108.395.935.174,35	95,22	68.550.049.288,50
Belanja Modal	233.154.195.936,00	222.007.542.803,44	95,22	109.307.533.452,00

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp108.395.935.174,35 atau 95,22 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp222.007.542.803,44 atau 95,22 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2023 dan tahun 2022.

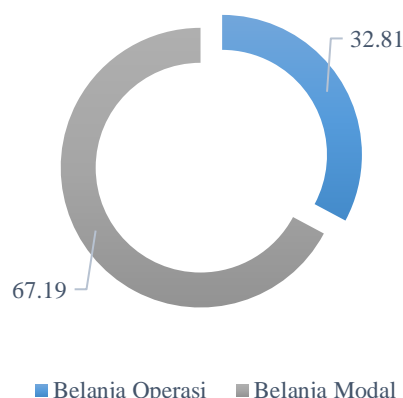
**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2023 dan tahun 2022. Terjadi peningkatan pada bagian belanja operasi sebesar Rp39.845.885.885,85 atau 58,13 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp68.550.049.288,50 meningkat menjadi Rp 108.395.935.174,35 di Tahun 2023. Hal yang sama terjadi pada bagian belanja modal, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp112.700.009.351,44 atau 103,10 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp109.307.533.452,00 meningkat menjadi Rp222.007.542.803,44 di Tahun 2023.

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Modal sebesar 61,19 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Operasi sebesar 32,81 persen dari total realisasi anggaran belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja**  
**Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>108.395.935.174,35</b>	<b>68.550.049.288,50</b>

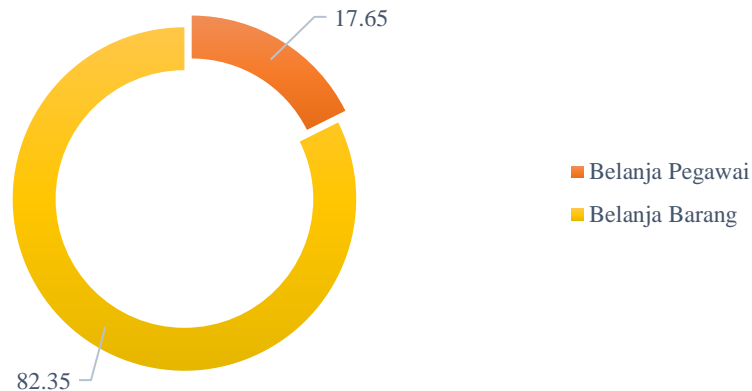
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp108.395.935.174,35 atau 95,22 persen dari Anggaran sebesar Rp113.832.285.002,00. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini meningkat sebesar Rp39.845.885.885,85 dari tahun 2022. Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2023:

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	21.941.845.746,00	19.127.165.135,00	87,17	18.528.878.021,00
Belanja Barang dan Jasa	91.890.439.256,00	89.268.770.039,35	97,15	50.021.171.267,50
<b>Jumlah</b>	<b>113.832.285.002,00</b>	<b>108.395.935.174,35</b>	<b>95,22</b>	<b>68.550.049.288,50</b>

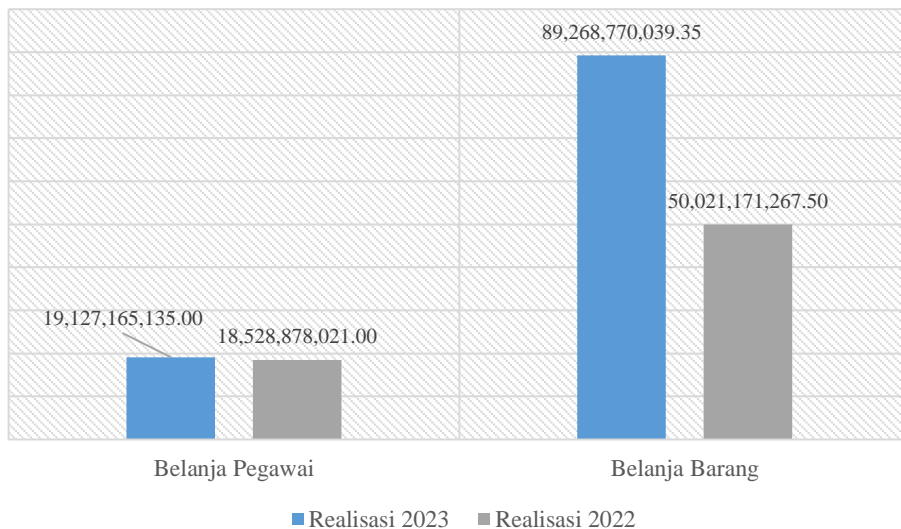
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp19.127.165.135,00 atau 87,17 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa sebesar Rp89.268.770.039,35 atau 97,15 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi:

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.4 komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Barang dan Jasa 82,35 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pegawai sebesar 17,65 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Berikut komparasi realisasi belanja operasi Tahun 2023 dan 2022.

**Gambar 5.5**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada bagian belanja pegawai sebesar Rp598.287.114,00 atau 3,23 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp18.528.878.021,00 meningkat menjadi Rp19.127.165.135,00 di Tahun 2023. Hal yang sama terjadi pada bagian Belanja Barang dan Jasa, dimana terjadi peningkatan sebesar

Rp39.247.598.771,85 atau 78,46 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp50.021.171.267,50 menurun menjadi Rp89.268.770.039,35 di Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>19.127.165.135,00</b>	<b>18.528.878.021,00</b>

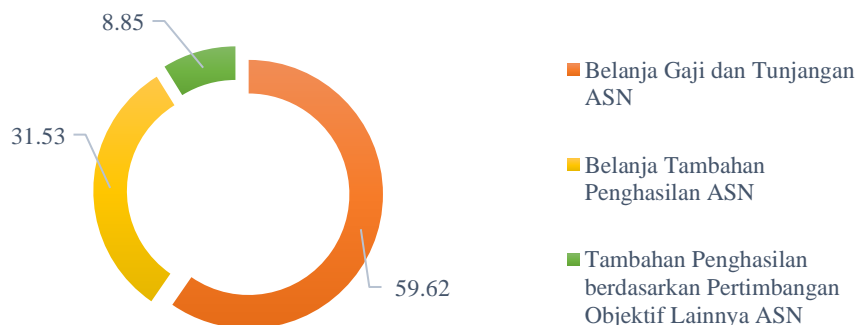
Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2023 sebesar Rp19.127.165.135,00 atau 93,01 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 meningkat sebesar Rp598.287.114,00 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.484.702.514,00	11.403.095.337,00	84,56
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.494.426.248,00	6.069.391.699,00	92,37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	745.160.000,00	726.110.000,00	87,81
Jumlah	21.941.845.746,00	19.127.165.135,00	87,17

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang terdiri 3 (tiga) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp6.030.569.798,00 atau 92,37 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing item-item belanja pegawai.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai Tahun 2023**

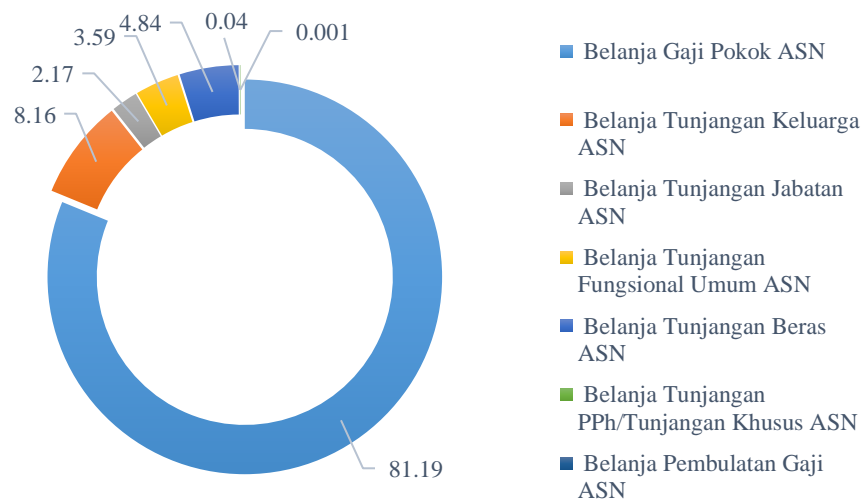


Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi

anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 59,62 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 8,85 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai.

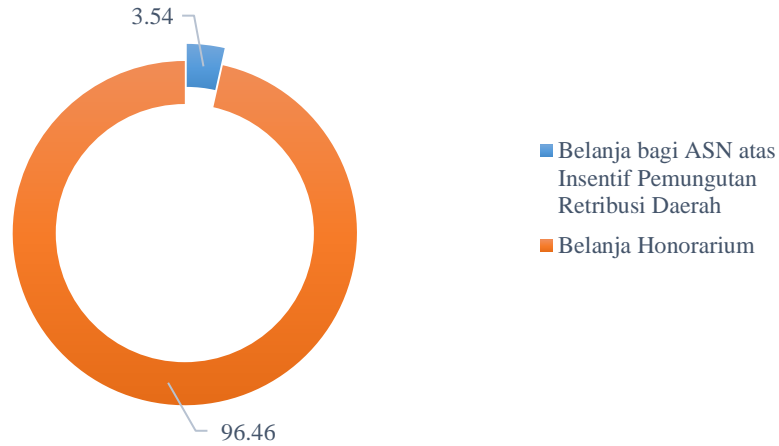
Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 81,19 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.7 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan PNS hanya tersapat satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi sebesar Rp 6.030.569.798,00 atau 93,46 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**



Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar 96,46 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 3,54 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>89.268.770.039,35</b>	<b>50.021.171.267,50</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp89.268.770.039,35 atau 97,32 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini bertambah sebesar Rp39.247.598.771,85 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023.

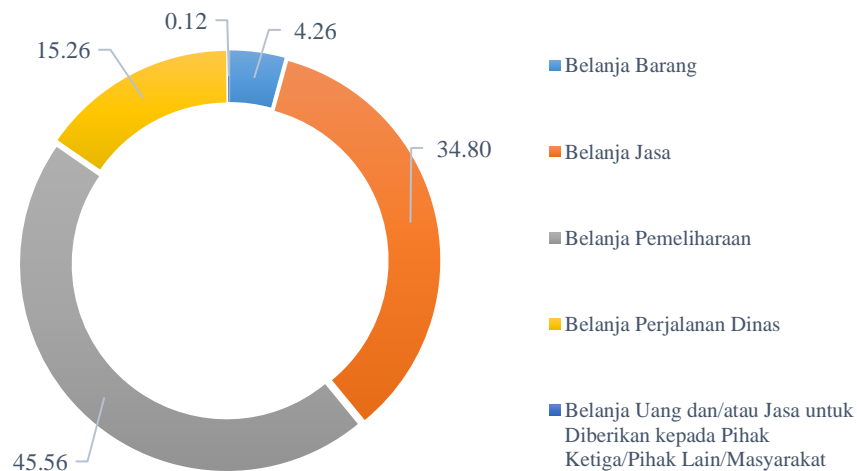
**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan**  
**Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Barang	3.935.062.012,00	3.799.238.673,00	96,55
Belanja Jasa	32.226.216.154,00	31.062.951.126,35	96,39
Belanja Pemeliharaan	40.776.818.890,00	40.674.814.552,00	99,75
Belanja Perjalanan Dinas	14.845.842.200,00	13.625.405.688,00	91,78
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	106.500.000,00	106.360.000,00	99,87
<b>Jumlah</b>	<b>91.890.439.256,00</b>	<b>89.268.770.039,35</b>	<b>97,15</b>



Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang terdiri 5 (lima) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp106.360.000,00 atau 99,87 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing item-item Belanja Barang dan Jasa.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa**



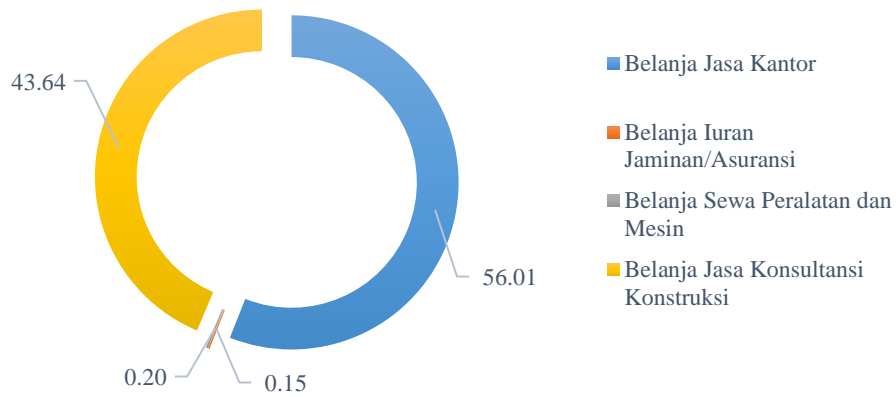
Berdasarkan gambar 5.9 Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan sebesar 45,56 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 0,12 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya tersapat satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp 3.799.238.673,00 atau 96,55 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar 56,01 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar 0,15 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi.

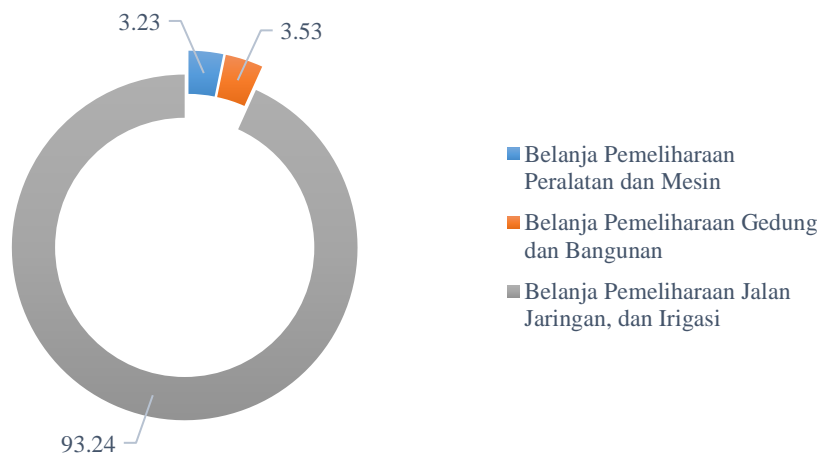
Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa**  
**Tahun 2023**



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 93,24 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 3,23 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan**  
**Tahun 2023**



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya tersapat satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp13.625.405.688,00 atau 91,78 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>222.007.542.803,44</b>	<b>109.307.533.452,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

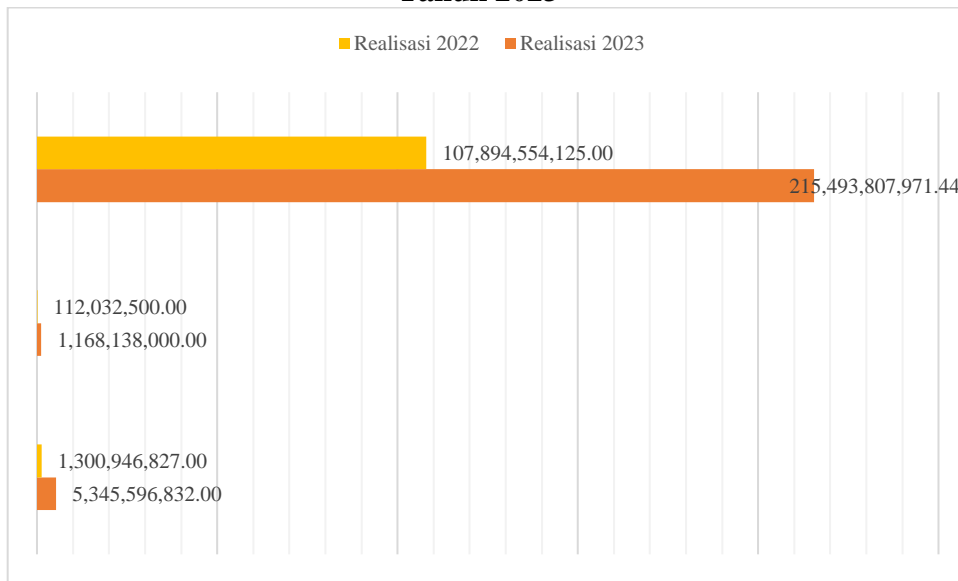
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp222.007.542.803,44 atau 95,22 persen dari anggaran sebesar Rp233.154.195.936,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini meningkat sebesar Rp112.700.009.351,44 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2023.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2023	2023		2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.478.961.395,00	5.345.596.832,00	97,57	1.300.946.827,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.174.800.000,00	1.168.138.000,00	99,43	112.032.500,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.500.434.541,00	215.493.807.971,44	95,14	107.894.554.125,00
<b>Jumlah</b>	<b>233.154.195.936,00</b>	<b>222.007.542.803,44</b>	<b>95,22</b>	<b>109.307.533.452,00</b>

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rincian realisasi Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang terdiri 3 (tiga) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada bagian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.168.138.000,00 atau 99,43 persen dari jumlah yang dianggarkan sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada bagian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp215.493.807.971,44 atau 95,14 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal**  
**Tahun 2023**



Pada gambar 5.12 di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.044.650.005,00 atau 310,90 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.300.946.827,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.056.105.500,00 atau 942,68 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp112.032.500,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp107.599.253.846,44 atau 99,73 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp107.894.554.125,00.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.345.596.832,00</b>	<b>1.300.946.827,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 sebesar Rp5.345.596.832,00 atau 97,57 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.044.650.005,00 atau 310,90 persen dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

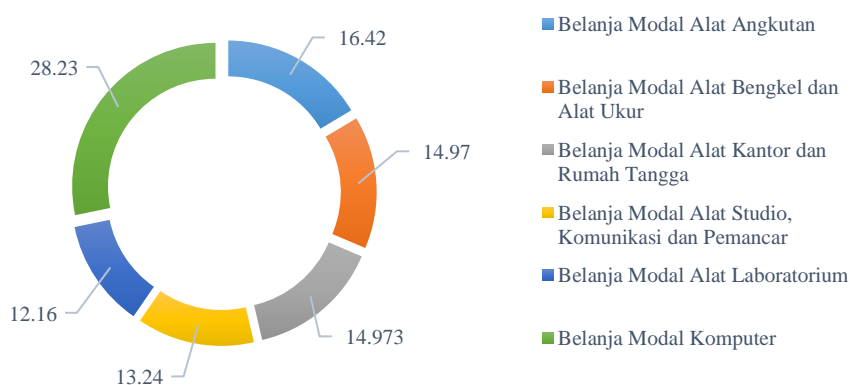
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	913.739.567,00	877.702.000,00	96,06
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	801.868.000,00	800.312.000,00	99,81

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	812.901.436,00	800.412.000,00	98,46
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	718.585.510,00	707.950.000,00	98,52
Belanja Modal Alat Laboratorium	660.174.000,00	650.180.832,00	98,49
Belanja Modal Komputer	1.571.692.882,00	1.509.040.000,00	96,01
<b>Jumlah</b>	<b>5.478.961.395,00</b>	<b>5.345.596.832,00</b>	<b>97,57</b>

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) kelompok item Belanja dimana tingkat realisasi tertinggi dari kelompok Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan realisasi sebesar Rp800.312.000,00 atau 99,81% dari jumlah yang dianggarkan.

Komposisi untuk item pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp800.412.000,00 atau 14,97 persen dari total anggaran yang terealisasi, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp650.180.832,00 atau hanya 12,16 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi masing-masing Belanja Modal dan Peralatan dan mesin.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023**



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.168.138.000,00</b>	<b>112.032.500,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 sebesar Rp1.168.138.000,00 atau 99,43 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar

Rp1.056.105.500,00 atau 942,68 persen dari tahun 2022. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini:

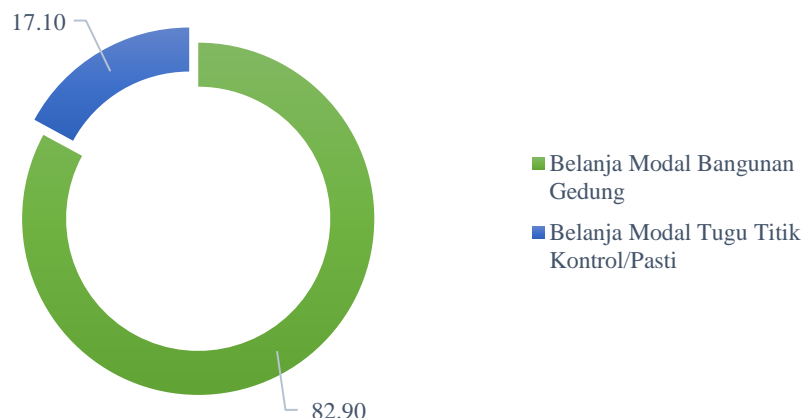
**Tabel 5.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.174.800.000,00</b>	<b>1.168.138.000,00</b>	<b>99,43</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung	975.000.000,00	968.433.000,00	99,33
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.800.000,00	199.705.000,00	99,95

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 hanya terdiri dari 2 kelompok yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp968.433.000,00 atau 99,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp199.705.000,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar 82,90 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yaitu sebesar 17,10 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Gedung dan Bangunan. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisinya.

**Gambar 5.14**  
**Komposi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>215.493.807.971,44</b>	<b>107.894.554.125,00</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2023 sebesar Rp215.493.807.971,44 atau 95,14 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp226.500.434.541,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	226.500.434.541,00	215.493.807.971,44	95,14
<b>Jumlah</b>	<b>226.500.434.541,00</b>	<b>215.493.807.971,44</b>	<b>95,14</b>

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 hanya terdiri dari 1 (satu) kelompok dimana tingkat realisasi dari kelompok Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar 95,14 persen. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp107.599.253.846,44 atau 99,73 persen dari tahun 2022.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(327.281.609.369,79)</b>	<b>(175.866.449.740,50)</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami Defisit Sebesar Rp327.281.609.369,79 atau meningkat sebesar Rp151.415.159.629,29 dari tahun 2022 sebesar Rp175.866.449.740,50. Jumlah tersebut sudah termasuk Defisit pada UPTD yang di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>1.122.570.261.553,98</b>	<b>993.677.228.722,94</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

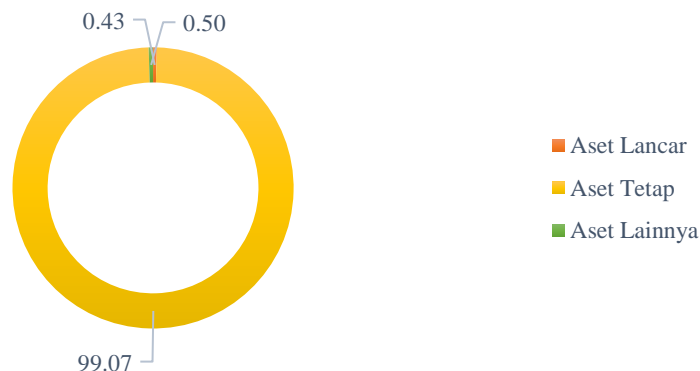
diperoleh, baik oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.122.570.261.553,98, terjadi peningkatan sebesar Rp128.893.032.831,04 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp993.677.228.722,94. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.10 berikut menunjukkan rinciannya.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	4.868.874.226,50	5.007.533.752,00	(138.659.525,50)
Aset Tetap	1.112.079.360.446,48	981.317.180.771,94	130.762.179.674,54
Aset Lainnya	5.622.026.881,00	7.352.514.199,00	(1.730.487.318,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.122.570.261.553,98</b>	<b>993.677.228.722,94</b>	<b>128.893.032.831,04</b>

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berasal dari aset lancar sebesar Rp4.868.797.464,00, aset tetap sebesar Rp1.049.643.651.414,38 serta aset lainnya sebesar Rp7.352.514.199,00. Nilai aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp4.311.586.582,32, nilai aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp68.326.470.642,44, dan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2023.

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Jenis Aset Tahun 2023**





Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 99,07 persen. Sedangkan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,43 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>4.868.874.226,50</b>	<b>5.007.533.752,00</b>

Aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp4.868.874.226,50, jumlah tersebut mengalami penurunan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp5.007.533.752,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp138.659.525,50. Aset lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo persediaan dan Piutang Lainnya. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Piutang Lainnya	247.411.528,68
Persediaan	4.621.462.697,82
<b>Jumlah</b>	<b>4.868.874.226,50</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendaharan Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Berdasarkan surat tanda setoran (STS) Bendahara Penerimaan Nomor 01.03.20026.7 tanggal 31 Desember 2023, semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahata pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Piutang Lainnya</b>	<b>247.411.528,68</b>	<b>247.411.528,68</b>

Piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp247.411.528,68 yang merupakan realisasi pembayaran atas pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp3.854.770.800,00, sedangkan progres fisik penyelesaian 72,22 persen sebesar Rp3.607.359.271,32 sehingga kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan sebesar Rp247.411.528,68.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Persediaan</b>	<b>4.621.462.697,82</b>	<b>4.760.122.223,32</b>

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*), jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.621.462.697,82. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2023 dan 2022.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023
Alat Tulis Kantor	1.639.762,50
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.619.822.935,32
<b>Jumlah</b>	<b>4.621.462.697,82</b>

5.2.1.2 Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<b>1.112.079.360.446,48</b>	<b>981.317.180.771,94</b>

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah aset tetap (nilai buku) pada Tahun 2023 sebesar Rp1.112.079.360.446,48 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.557.605.993.453,75. Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp213.137.085.509,29 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

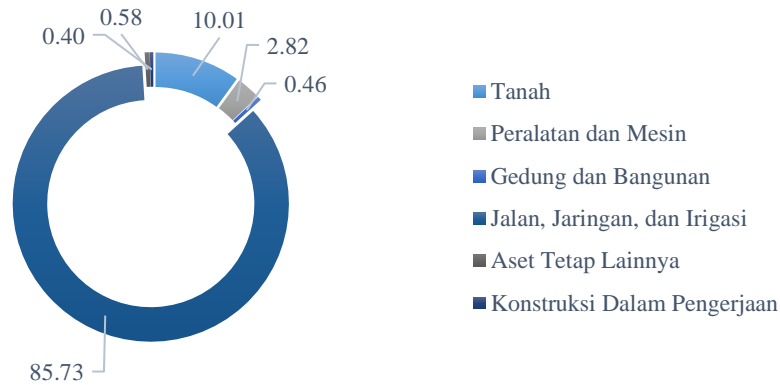
**Tabel 5.13**  
**Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
Tanah	271.996.442.577,00	268.160.297.830,00	3.836.144.747,00
Peralatan dan Mesin	55.706.092.566,00	70.065.889.972,00	(14.359.797.406,00)
Gedung dan Bangunan	13.009.584.400,00	11.269.251.400,00	1.740.333.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.183.958.634.109,88	2.080.837.638.039,94	103.120.996.069,94
Aset Tetap Lainnya	15.547.778.611,00	15.547.778.611,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.466.821.636,35	10.667.412.538,00	118.799.409.098,35
<b>Harga Perolehan</b>	<b>2.669.685.353.900,23</b>	<b>2.456.548.268.390,94</b>	<b>213.137.085.509,29</b>
Akumulasi Penyusutan	(1.557.605.993.453,75)	(1.475.231.087.619,00)	(82.374.905.834,75)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>1.112.079.360.446,48</b>	<b>981.317.180.771,94</b>	<b>130.762.179.674,54</b>

Berdasarkan tabel di atas Aset Tetap Tanah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.836.144.747,00, Aset Tetap Peralatan Dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp14.359.797.406,00, Aset Tetap Gedung Dan Bangunan mengalami

peningkatan sebesar Rp1.740.333.000,00, Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp103.120.996.069,94, Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan kontribusi jenis aset tetap terhadap total aset tetap.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Jenis Aset Tetap Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.16 aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 85,73 persen dari total Aset Tetap dan aset tetap lainnya memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,40 persen dari total Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap Tahun 2023**

Jenis Aset	Ekstra s/d 2022	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2023
		Debit	Kredit	
Peralatan dan Mesin	30.177.340,00	0,00	0,00	30.177.340,00
Gedung dan Bangunan	9.877.000,00	0,00	0,00	9.877.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>40.054.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.054.340,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 barang ekstrakomptabel tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakomptabel tahun 2022. Rincian barang ekstrakomptabel terlampir pada lampiran barang ekstrakomptabel.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>271.996.442.577,00</b>	<b>268.160.297.830,00</b>

Jumlah aset tetap – tanah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp271.996.442.577,00. Jumlah aset tetap – tanah per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.836.144.747,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap tanah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang hanya berupa tanah bangunan perumahan. Berikut disajikan mutase rincian aset tetap tanah tahun 2023.

**Tabel 5.17**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023**

Uraian	Jumlah
<b>Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Des 2022</b>	<b>268.160.297.830,00</b>
Mutasi Bertambah	
Hibah	604.180.747,00
Reklasifikasi dari aset lain-lain	3.231.964.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Tanah</b>	<b>3.836.144.747,00</b>
Mutasi Berkurang	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Tanah</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>3.836.144.747,00</b>
<b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2023</b>	<b>271.996.442.577,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – tanah tahun 2023 sebesar Rp3.836.144.747,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah aset tetap tanah sebesar Rp604.180.747,00 yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dengan nomor dokumen 621/ 138/ Bid. Bintek, Tanggal 17 Januari 2023 dengan spesifikasi Tanah untuk Jalan di ruas Luwuk - Batui, Desa Uso, Kabupaten Banggai.
- b. Mutasi bertambah aset tetap tanah sebesar Rp3.231.964.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset lain-lain.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>55.706.092.566,00</b>	<b>70.065.889.972,00</b>

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp55.706.092.566,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.359.797.406,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp70.065.889.972,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.18**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Tractor	50.360.495.734,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	547.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	330.702.000,00
Alat Ukur Lainnya	800.312.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	44.240.000,00
Alat Kantor Lainnya	85.740.000,00
Mebel	411.342.000,00
Alat Pembersih	8.490.000,00
Alat Pendingin	192.950.000,00
Alat Dapur	4.900.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	36.800.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.950.000,00
Peralatan Studio Audio	10.100.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	697.850.000,00
Unit Alat Laboratorium Lainnya	650.180.832,00
Personal Computer	1.315.460.000,00
Komputer Unit Lainnya	23.850.000,00
Peralatan Personal Computer	31.020.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	138.710.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.706.092.566,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri sebelas jenis aset tetap, dimana alat besar merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2023.

**Tabel 5.19**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

Uraian	Jumlah
<b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2022</b>	<b>70.065.889.972,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Pengadaan Belanja Modal	5.345.596.832,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.345.596.832,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi aset lain-lain	19.705.394.238,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>19.705.394.238,00</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>(14.359.797.406,00)</b>
<b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2023</b>	<b>55.706.092.566,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi berkurang pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp14.359.797.406,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp5.345.596.832,00 yang merupakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Belanja Modal Alat Angkutan	877.702.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	800.312.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	800.412.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	707.950.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	650.180.832,00
Belanja Modal Komputer	1.509.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.345.596.832,00</b>

- b. Mutasi berkurang sebesar Rp19.705.394.238,00 yang merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>13.009.584.400,00</b>	<b>11.269.251.400,00</b>

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp13.009.584.400,00. Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.740.333.000,00 dari nilai aset tetap – gedung dan bangunan

yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.269.251.400,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2023.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Kantor	12.438.936.400,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.505.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	171.438.000,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	199.705.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.009.584.400,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap gedung dan bangunan yang terdiri empat jenis aset tetap gedung dan bangunan, dimana kontribusi bangunan gedung kantor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – gedung dan bangunan selama tahun 2023.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>	<b>11.269.251.400,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	1.168.138.000,00
Reklasifikasi dari aset rusak berat	848.800.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>2.016.938.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi ke aset rusak berat	70.200.000,00
Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel	6.700.000,00
Belanja yang tidak dapat diklasifikasi menjadi belanja modal	199.705.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>276.605.000,00</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>1.740.333.000,00</b>
<b>Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>13.009.584.400,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp1.740.333.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp1.168.138.000,00 yang merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.23**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Belanja modal bangunan gedung kantor	597.490.000,00
Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga	199.505.000,00
Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya	171.438.000,00
Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya	199.705.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.168.138.000,00</b>

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp848.800.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset peralatan dan mesin
- c. Mutasi berkurang sebesar Rp70.200.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset rusak berat.
- d. Mutasi berkurang sebesar Rp6.700.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset barang ekstrakomptabel.
- e. Mutasi berkurang sebesar Rp199.705.000,00 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dapat dikategorikan menjadi aset tetap.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2.183.958.634.109,88</b>	<b>2.080.837.638.039,94</b>

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.296.331.446.011,38. Nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp103.120.996.069,94 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Jalan Nasional	1.968.464.826.138,44
Jalan Provinsi	191.543.555.281,44
Jembatan pada Jalan Provinsi	23.950.252.690,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.183.958.634.109,88</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi jalan nasional merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023.

**Tabel 5.25**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022</b>	<b>2.080.837.638.039,94</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	215.493.807.971,44
Hibah	2.047.757.479,00
Kapitalisasi	6.700.158.717,85
Reklasifikasi antara aset tetap	2.063.501.316,95
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>226.305.225.485,24</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi ke aset rusak berat	1.322.684.000,00
Reklasifikasi antara aset tetap	120.862.910.415,30
Belanja Non Modal	998.635.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>123.184.229.415,30</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>103.120.996.069,94</b>
<b>Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023</b>	<b>2.183.958.634.109,88</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp103.120.996.069,94, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp215.493.807.971,44 yang merupakan realisasi pengadaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Belanja Modal Jalan Provinsi	191.543.555.281,44
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	23.950.252.690,00
<b>Jumlah</b>	<b>215.493.807.971,44</b>

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp2.047.757.479,00 yang merupakan hibah dari pemerintah pusat berupa Jalan Ruas Luwuk - Batui, Desa Uso, Kabupaten Banggai, dan Jembatan (Jembatan Sinawa dan Jembatan Masolang) di ruas Luwuk - Batui, Desa Uso, Kabupaten Banggai.
- c. Mutasi bertambah sebesar Rp6.700.158.717,85 yang merupakan kapitalisasi dari beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	
1.	Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	47.940.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	
2.	Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.652.218.717,85
<b>JUMLAH</b>		<b>6.700.158.717,85</b>

d. Mutasi bertambah sebesar Rp2.063.501.316,95 yang merupakan reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dan konstruksi dalam pengerjaan.

e. Mutasi berkurang sebesar Rp1.322.684.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap jalan irigasi dan jaringan ke aset lain-lain yang diakibatkan perubahan kondisi dari baik ke rusak berat, dengan rincian sebagai berikut

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Jembatan Lintasan Basah II	74.856.000,00
2.	Jembatan Buni Balia I	149.977.000,00
3.	Jembatan Ambi Loba II	79.983.000,00
4.	Jembatan Lambolo	34.800.000,00
5.	Jembatan Tiga Dara	68.544.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.322.684.000,00</b>

f. Mutasi berkurang sebesar Rp120.862.910.415,30 yang merupakan reklasifikasi aset tetap jalan irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan.

g. Mutasi berkurang sebesar Rp998.635.000,00 yang merupakan Jalan Ruas Sp. Jalan Provinsi Kalemago – Tamadue dengan nomor SP2D: 22191/SP2D-LS/BPKAD/2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>15.547.778.611,00</b>	<b>15.547.778.611,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2023 disajikan sebesar Rp15.547.778.611,00. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 5.27**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Uraian	Nilai
Bahan Perpustakaan	4.453.968.111,00
Tanaman	537.928.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	10.555.882.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.547.778.611,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap lainnya terdiri dari tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi bahan perpustakaan merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>129.466.821.636,35</b>	<b>10.667.412.538,00</b>

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp129.466.821.636,35, yang merupakan konstruksi dalam pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>1.557.605.993.453,75</b>	<b>1.475.231.087.619,00</b>

Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp82.374.905.834,75. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 yaitu:

**Tabel 5.28**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	56.475.949.912,00	(17.314.131.953,00)	3.810.754.079,00	42.972.572.038,00
Gedung dan Bangunan	2.717.798.325,00	634.379.221,00	230.191.495,00	3.582.369.041,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.416.037.339.382,00	(37.019.673.100,00)	131.804.675.304,75	1.510.822.341.586,75
Aset Tetap Lainnya	0,00	17.593.138,00	211.117.650,00	228.710.788,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.475.231.087.619,00</b>	<b>(53.681.832.694,00)</b>	<b>136.056.738.528,75</b>	<b>1.557.605.993.453,75</b>

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.29**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023**

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku 2023
Tanah	271.996.442.577,00	0,00	271.996.442.577,00
Peralatan dan Mesin	55.706.092.566,00	(42.972.572.038,00)	12.733.520.528,00
Gedung dan Bangunan	13.009.584.400,00	(3.582.369.041,00)	9.427.215.359,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.183.958.634.109,88	(1.510.822.341.586,75)	673.136.292.523,13
Aset Tetap Lainnya	15.547.778.611,00	(228.710.788,00)	15.319.067.823,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.466.821.636,35	0,00	129.466.821.636,35
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.669.685.353.900,23</b>	<b>(1.557.605.993.453,75)</b>	<b>1.112.079.360.446,48</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.669.685.353.900,23 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.557.605.993.453,75 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.112.079.360.446,48.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>5.622.026.881,00</b>	<b>7.352.514.199,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah Aset lainnya yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp5.622.026.881,00. Nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1.730.487.318,00 dari tahun sebelumnya.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp42.224.706.342,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp36.602.679.461,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp5.622.026.881,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel sebesar Rp82.068.250,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>62.002.571,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban di tahun 2023 sebesar Rp62.002.571,00, yang merupakan utang belanja di tahun 2023

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Utang Belanja</b>	<b>62.002.571,00</b>	<b>0,00</b>

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Adapun utang belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp62.002.571,00. Dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.30**  
**Rincian Utang Belanja Tahun 2023**

Jenis Rekening	Nomor Tagihan	Nilai
Listrik	312100150262	50.228.763,00
Listrik	312100167214	78.500,00
Listrik	312100147311	1.091.129,00
Listrik	312101233400	2.424.067,00
Telepon	0451483303	60.891,00
Telepon	0451481540	64.221,00

Jenis Rekening	Nomor Tagihan	Nilai
Internet	172704208910	652.100,00
Internet	172705213287	609.700,00
Internet	1450	2.264.400,00
Internet	1451	2.264.400,00
Internet	1452	2.264.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>62.002.571,00</b>

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>1.122.508.258.982,98</b>	<b>993.677.228.722,94</b>

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.122.508.258.982,98 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp993.677.228.722,94 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp128.831.030.260,04.

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan LO</b>	<b>5.773.806.834,00</b>	<b>1.991.133.000,00</b>

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 disajikan sebesar Rp5.773.806.834,00. Nilai pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.782.673.834,00 atau 189,98 persen dari nilai pendapatan tahun 2022. Adapun rincian pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.31**  
**Rincian Pendapatan Tahun 2023**

Jenis Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	3.121.868.608,00	1.991.133.000,00	1.130.735.608,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.651.938.226,00	0,00	2.651.938.226,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.773.806.834,00</b>	<b>1.991.133.000,00</b>	<b>3.782.673.834,00</b>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (LO)</b>	<b>3.121.868.608,00</b>	<b>1.991.133.000,00</b>

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo pendapatan asli daerah pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.130.735.608,00 atau 56,79 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian pendapatan asli daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2023.

**Tabel 5.32**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

Jenis Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Retribusi Daerah	3.119.868.608,00	1.991.133.000,00	1.130.735.608,00
Lain-lain pendapatan asli daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.121.868.608,00</b>	<b>1.991.133.000,00</b>	<b>1.130.735.608,00</b>

Berdasarkan tabel di atas pendapatan asli daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruanga Tahun 2023 terdiri dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Retribusi daerah disajikan sebesar Rp3.119.868.608,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.130.735.608,00 dari tahun sebelumnya dan Lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp2.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO</b>	<b>2.651.938.226,00</b>	<b>0,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.651.938.226,00, yang merupakan hibah tanah bangunan perumahan sebesar Rp604.180.747,00 dan jalan nasional sebesar Rp2.047.757.479,00.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Beban</b>	<b>240.245.917.290,75</b>	<b>301.270.648.708,50</b>

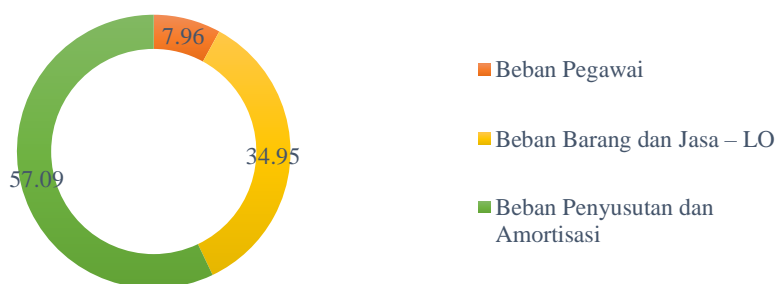
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar Rp61.024.731.417,75 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yaitu sebesar Rp240.245.917.290,75. Berikut ini rincian beban pada Tahun 2023 dan 2022:

**Tabel 5.33**  
**Rincian Beban Operasi**  
**Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Bertambah/berkurang</b>	
			<b>Rp.</b>	<b>%</b>
Beban Pegawai	19.127.165.135,00	18.528.878.021,00	598.287.114,00	3,23
Beban Barang dan Jasa – LO	83.974.313.418,00	46.979.243.819,50	36.995.069.598,50	78,75
Beban Penyusutan dan Amortisasi	137.144.438.737,75	153.681.072.161,00	(16.536.633.423,25)	10,76
<b>Jumlah</b>	<b>240.245.917.290,75</b>	<b>301.270.648.708,50</b>	<b>(61.024.731.417,75)</b>	<b>(20,26)</b>

Berdasarkan Tabel 5.55 di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, jika dibandingkan tahun sebelumnya peningkatan terbesar terjadi pada beban barang dan jasa yaitu sebesar Rp36.995.069.598,50 atau 78,75 persen. Berikut komposisi masing-masing jenis beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Jenis Beban Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.17 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023, yaitu Beban Penyusutan dan Amorisasi sebesar 57,09 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pegawai sebesar 7,96 persen dari total Beban pada Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>19.127.165.135,00</b>	<b>18.528.878.021,00</b>

Beban pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawsesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp598.287.114,00 atau 3,23 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beserta komposisi beban pegawai Tahun 2023 :

**Tabel 5.34**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2023**

Uraian	Nilai Beban Tahun 2023	Komposisi (%)
Beban Gaji Pokok PNS	9.258.359.015,00	48,40
Beban Tunjangan Keluarga PNS	930.694.264,00	4,87
Beban Tunjangan Jabatan PNS	247.450.000,00	1,29
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	409.545.000,00	2,14
Beban Tunjangan Beras PNS	551.840.400,00	2,89
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.087.593,00	0,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	119.065,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.030.569.798,00	31,53
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	0,31
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.413.500.000,00	7,39
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.960.000,00	0,26
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	171.040.000,00	0,89
<b>Jumlah</b>	<b>19.127.165.135,00</b>	

Berdasarkan Tabel 5.25 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 48,40 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji PNS yaitu sebesar 0,001 persen.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.35**  
**Rincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2023**

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok PNS	9.258.359.015,00	9.258.359.015,00	0,00
Tunjangan Keluarga PNS	930.694.264,00	930.694.264,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	247.450.000,00	247.450.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	409.545.000,00	409.545.000,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	551.840.400,00	551.840.400,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.087.593,00	5.087.593,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	119.065,00	119.065,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS	6.030.569.798,00	6.030.569.798,00	0,00
Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.413.500.000,00	1.413.500.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.960.000,00	48.960.000,00	0,00
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	171.040.000,00	171.040.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.127.165.135,00</b>	<b>19.127.165.135,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>83.974.313.418,00</b>	<b>46.979.243.819,50</b>

Beban barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp89.407.506.327,35. Beban barang dan jasa di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp36.995.069.598,50 atau meningkat 78,75

persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2023.

**Tabel 5.36**  
**Rincian beban barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2023	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Kimia	13.722.375,00	0,015
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	772.809.000,00	0,864
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.880.000,00	0,003
Beban Bahan-Bahan Lainnya	102.300.000,00	0,114
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	275.261.449,00	0,308
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	449.034.746,00	0,502
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	674.822.789,00	0,755
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	44.620.000,00	0,050
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	94.967.110,00	0,106
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.796.000,00	0,013
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	53.940.300,00	0,060
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	171.945.250,00	0,192
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	202.589.442,00	0,227
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	0,001
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.048.476.500,00	1,173
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.550.000,00	0,020
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	119.970.000,00	0,134
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	188.490.000,00	0,211
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.959.688.000,00	10,021
Beban Jasa Tenaga Ahli	5.728.835.000,00	6,408
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	529.097.623,00	0,592
Beban Jasa Tenaga Keamanan	413.883.500,00	0,463
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	209.950.000,00	0,235
Beban Jasa Kalibrasi	79.931.100,00	0,089
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	264.141.000,00	0,295
Beban Tagihan Telepon	128.805.100,00	0,144
Beban Tagihan Listrik	21.250.000,00	0,024
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.401.344,00	0,002
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	571.594.364,00	0,639
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.710.000,00	0,005
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	102.852.831,00	0,115
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	74.444.900,00	0,083
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.780.000,00	0,051
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	0,030
Beban Sewa Peralatan Jaringan	7.700.000,00	0,009

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2023	
	Rp.	%
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.426.000,00	0,032
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	47.932.000,00	0,054
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	19.740.000,00	0,022
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4.492.271.386,50	5,024
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	21.367.000,00	0,024
Beban Bimbingan Teknis	6.234.831.337,85	6,973
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.738.858.640,00	3,063
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	888.405.855,00	0,994
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	131.508.850,00	0,147
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	99.654.000,00	0,111
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	79.674.000,00	0,089
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.000.000,00	0,008
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.000.000,00	0,022
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	39.610.000,00	0,044
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	34.410.000,00	0,038
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	0,017
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	1.435.810.817,00	1,606
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	32.986.898.530,00	36,895
Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.936.842.500,00	5,522
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.506.939.688,00	15,107
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.046.000,00	0,067
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	58.420.000,00	0,065
<b>Jumlah</b>	<b>89.407.506.327,35</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Tabel 5.25 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi yaitu sebesar 36,89 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Obat-Obatan-Obat yaitu sebesar 0,001 persen.

Nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2023 dan realisasi belanja pegawai tahun 2023.

**Tabel 5.37**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa**  
**dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.798.752,00	0,00	46.798.752,00
Bahan-Bahan Kimia	13.722.375,00	13.722.375,00	0,00
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	772.809.000,00	772.809.000,00	0,00
Bahan-Isi Tabung Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
Bahan-Bahan Lainnya	1.198.340.000,00	0,00	1.198.340.000,00
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	102.300.000,00	102.300.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.739.686,50	274.355.749,00	(616.062,50)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	450.479.746,00	450.479.746,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	674.822.789,00	674.822.789,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44.620.000,00	44.620.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	94.967.110,00	94.967.110,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.796.000,00	11.796.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.940.300,00	53.940.300,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	171.945.250,00	171.945.250,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.313.854,00	63.313.854,00	0,00
Obat-Obatan-Obat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	92.476.836,00	0,00	92.476.836,00
Makanan dan Minuman Rapat	1.048.476.500,00	1.048.476.500,00	0,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	119.970.000,00	119.970.000,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	188.490.000,00	188.490.000,00	0,00
Jasa Tenaga Penanganan Bencana	8.959.688.000,00	8.959.688.000,00	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.728.835.000,00	5.728.835.000,00	0,00
Jasa Tenaga Ahli	529.097.623,00	529.097.623,00	0,00
Jasa Tenaga Kebersihan	413.883.500,00	413.883.500,00	0,00
Jasa Tenaga Keamanan	209.950.000,00	209.950.000,00	0,00
Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.931.100,00	79.931.100,00	0,00
Jasa Kontribusi Asosiasi	264.141.000,00	264.141.000,00	0,00
Jasa Kalibrasi	128.805.100,00	128.805.100,00	0,00
Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00
Tagihan Telepon	1.526.456,00	1.401.344,00	125.112,00

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Tagihan Listrik	625.416.823,00	571.594.364,00	53.822.459,00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	110.907.831,00	102.852.831,00	8.055.000,00
Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	74.444.900,00	74.444.900,00	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00
Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
Sewa Alat Kantor Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	28.426.000,00	28.426.000,00	0,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	47.932.000,00	47.932.000,00	0,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.444.331.386,50	4.492.271.386,50	(47.940.000,00)
Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	(417.387.380,00)	6.234.831.337,85	(6.652.218.717,85)
Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	2.738.858.640,00	2.738.858.640,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	888.405.855,00	888.405.855,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	131.508.850,00	131.508.850,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	99.654.000,00	99.654.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	79.674.000,00	79.674.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.610.000,00	39.610.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.435.810.817,00	1.435.810.817,00	0,00

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	32.986.898.530,00	32.986.898.530,00	0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	4.936.842.500,00	4.936.842.500,00	0,00
Perjalanan Dinas Biasa	13.506.939.688,00	13.506.939.688,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.046.000,00	60.046.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58.420.000,00	58.420.000,00	0,00
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	106.360.000,00	106.360.000,00	0,00
Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>83.974.313.418,00</b>	<b>(5.294.456.621,35)</b>	<b>89.268.770.039,35</b>

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp89.268.770.039,35 dan beban barang dan jasa sebesar Rp81.235.454.778,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp8.033.315.261,35. Berikut rincian penjelasan perbedaannya:

1. Terdapat selisih sebesar Rp46.798.752,00, dimana jumlah pengakuan Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2023.
2. Terdapat selisih sebesar Rp1.198.340.000,00 dimana jumlah pengakuan Beban Bahan-Bahan Lainnya lebih besar dibandingkan jumlah Beban Bahan-Bahan Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap yaitu belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp199.705.000,00 dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp998.635.000,00.
3. Terdapat selisih sebesar Rp616.062,50, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih kecil dibandingkan jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2023.
4. Terdapat selisih sebesar Rp92.476.836,00, dimana jumlah pengakuan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat lebih besar dibandingkan



- jumlah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2023.
5. Terdapat selisih sebesar Rp125.112,00, dimana jumlah pengakuan Beban Tagihan Telepon lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Tagihan Telepon, hal tersebut disebabkan adanya pengakuan nilai hutang belanja jasa kantor per 31 desember Tahun 2023.
  6. Terdapat selisih sebesar Rp53.822.459,00, dimana jumlah pengakuan Beban Tagihan Listrik lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Tagihan Listrik, hal tersebut disebabkan adanya pengakuan nilai hutang belanja jasa kantor per 31 desember Tahun 2023.
  7. Terdapat selisih sebesar Rp8.055.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, hal tersebut disebabkan adanya pengakuan nilai hutang belanja jasa kantor per 31 desember Tahun 2023.
  8. Terdapat selisih sebesar Rp47.940.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi belanja modal ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.
  9. Terdapat selisih sebesar Rp6.652.218.717,85, dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi, hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi belanja modal ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.
  10. Terdapat selisih sebesar Rp6.700.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan, hal tersebut disebabkan adanya pengakuan barang ekstrakomptabel.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>137.144.438.737,75</b>	<b>153.681.072.161,00</b>

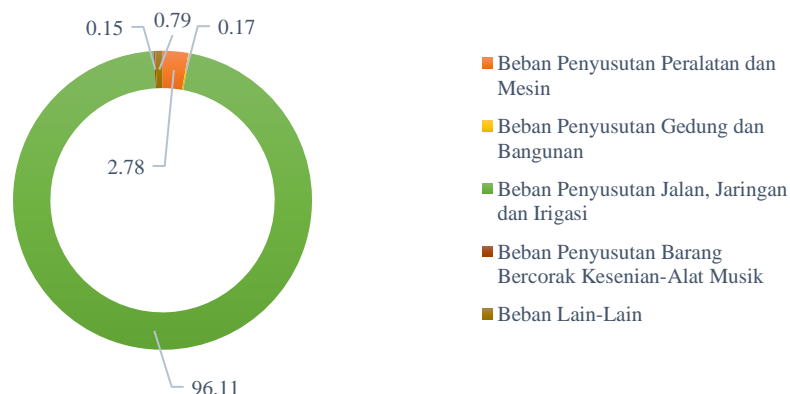
Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp137.144.438.737,75 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.536.633.423,25 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2023.

**Tabel 5.38**  
**Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023**

Uraian	Nilai Penyusutan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.810.754.079,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	230.191.495,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	131.804.675.304,75
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	211.117.650,00
Beban Lain-Lain	1.087.700.209,00
<b>Jumlah</b>	<b>137.144.438.737,75</b>

Tabel 5.35 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.810.754.079,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp230.191.495,00, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp148.002.201.774,00, Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional sebesar Rp131.804.675.304,75, Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebesar Rp211.117.650,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp1.087.700.209,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2023.

**Gambar 5.20**  
**Komposisi Beban Penyusutan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.20 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 96,11 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 0,15 persen.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>(234.472.110.456,75)</b>	<b>(299.279.515.708,50)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp234.472.110.456,75. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp64.807.405.251,75 atau 21,65 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2023. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp993.677.228.722,94 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.182.770.542.337,94 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp299.279.515.708,50 dan dikurangi koreksi ekuitas lainnya Rp66.634.826.721,00 dan ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp176.821.028.814,50. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

**Tabel 5.39**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	993.677.228.722,94	1.182.770.542.337,94
Surplus/Defisit-LO	(234.472.110.456,75)	(299.279.515.708,50)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	36.021.531.347,00	(66.634.826.721,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	327.281.609.369,79	176.821.028.814,50
<b>Ekuitas akhir</b>	<b>1.122.508.258.982,98</b>	<b>993.677.228.722,94</b>

#### 5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp993.677.228.722,94 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 yang juga sebesar Rp1.061.864.963.077,38.

#### 5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp234.472.110.456,75. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

#### 5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp36.021.531.347,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.40**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya**  
**Tahun 2021**

Uraian	Nilai
<b>Mutasi bertambah</b>	
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.314.131.953,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.019.673.100,00
Koreksi Nilai Koreksi Barang Ekstrakomptable	6.700.000,00
<b>Jumlah mutasi bertambah</b>	<b>54.340.505.053,00</b>
<b>Mutasi berkurang</b>	
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	634.379.221,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	17.593.138,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	17.667.001.347,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>18.318.973.706,00</b>
<b>Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>36.021.531.347,00</b>

#### 5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2023 sebesar Rp327.281.609.369,79. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara

OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 24 Mei 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002